

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.1. Latar Belakang**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman kepada Peraturan tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2020 merupakan rencana tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020 yang menjadi landasan/pedoman/acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk digabung menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran tahun 2020 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2020 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Barat. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan anggota Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan beberapa Staf di Sub Bagian Program dan Perencanaan. Setelah ditetapkannya Tim Penyusun Dokumen Renja, maka tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan orientasi. Pelaksanaan orientasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai Rencana Kerja OPD tahun 2020 dan menghimpun masukan-

masuk dari bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di dalam orientasi juga dilakukan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja. Penyusunan agenda kerja tetap memperhatikan agenda kerja yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator pembangunan di daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan gubernur mengenai Kalender Perencanaan.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sudah melakukan kajian dan pertimbangan terhadap capaian kinerja tahun 2018 dan evaluasi tahun 2019 dan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman guna Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengekoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD hubungan dengan Renja Kementrian/Lembaga ada satu Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dan kaitannya Renja Sekretariat DPRD dengan Kabupaten/Kota secara langsung belum jelas namun dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak langsung ada keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan Renja Kabupaten/Kota, Renja yang disusun adalah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja yang diajukan oleh Sekretariat DPRD tahun 2020 dengan beberapa program dan kegiatan nantinya akan menjadi dasar pengalokasian dana dalam penyusunan KUA/PPAS tahun 2020 untuk menjadi RAPBD yang akan ditetapkan mejadi APBD Tahun 2020 dengan catatan Rancangan Rencana Kerja tersebut harus mendapat legitimasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam RKPD Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, pasal 9 dijelaskan tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, dan pembagian tipe Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2020
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020.

14. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
15. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Perda No. 5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2020.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari tahun 2018.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
24. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/143/II/Ren.makro/Bappeda-2019 tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD tahun 2020 sebagai bahan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan (RKA) Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2020, agar program dan kegiatan yang disusun ada sinkronisasi dengan Rencana Kerja (Renja) yang disusun untuk tahun 2020 dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Rencana Kerja dan pendanaan untuk tahun 2020.

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 terdapat 6 (enam) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2018 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :**

a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini untuk memfasilitasi ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD, seperti pengadaan alas meja kecil, gelas hs, tutup gelas, stoples kue, piring kue kecil, tempat tisu, cangkir teh, sendok makan dan sendok garpu besar. Target anggaran tidak tercapai karena adanya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga yang tidak terlaksana.

b. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD, dalam pelaksanaannya serapan anggaran tidak mencapai target karena Adanya kegiatan di mesjid raya sehingga honor penceramah berlebih dan jumlah rapat paripurna yang di bawah perkiraan membuat honor pembaca Al-Quran tidak terealisasi seluruhnya.

c. Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip OPD

Kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen arsip, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini tidak mencapai seperti yang diharapkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.

d. Penyediaan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak mengikuti pemeriksaan Medical Check Up (MCU) sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini tidak tercapai karena masih ada anggota DPRD yang tidak melaksanakan check up sehingga menyebabkan anggaran check up tidak terealisasi

seluruhnya.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 11 (sebelas) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :**

- a. **Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**  
Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi bertujuan agar tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi bagi staf sekretariat DPRD. Seluruh kegiatan terlaksana, sisa anggaran merupakan sisa pengadaan printer untuk bagian keuangan harganya jauh di bawah perencanaan anggaran.
- b. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi**  
Kegiatan ini digunakan untuk memelihara peralatan studio, alat komunikasi dan alat informasi secara rutin/berkala untuk menunjang kelancaran tugas. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio yang kerusakannya di bawah perkiraan.
- c. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**  
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD untuk menjamin bahwa gedung kantor bisa digunakan dengan aman dan nyaman sehingga bisa menunjang kelancaran tugas di lingkungan sekretariat. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap gedung kantor yang kerusakannya di bawah perkiraan dan sisa kegiatan sewa bunga hias.
- d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas**  
Kegiatan ini digunakan untuk perbaikan kendaraan dinas/operasional DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas operasional yang kerusakan / pemeliharaannya di bawah perkiraan.
- e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor**  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang ada pada Sekretariat DPRD. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap AC Standing dan AC Split yang kerusakan/pemeliharaannya di bawah perkiraan.
- f. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap komputer dan komponennya serta pemeliharaan jaringan komputerisasi. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap komputer, printer dan laptop yang kerusakan/pemeliharaannya di bawah perkiraan.
- g. **Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor**  
Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor lama Sekretariat DPRD. Sisa kegiatan merupakan sisa pembayaran kegiatan perencanaan yang akan dibayarkan setelah fisik perencanaan selesai.
- h. **Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan mobil jabatan yaitu kendaraan dinas pimpinan dan sekretaris, BBM, Pajak dan bea balik nama kendaraan. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas jabatan yang kerusakan/pemeliharaannya di bawah perkiraan.

i. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess, dan tersedianya jasa petugas satpam dan *cleaning service*. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap gedung rumah dinas yang kerusakan/pemeliharaannya di bawah perkiraan.

j. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/perengkapan Rumah Jabatan/Dinas/ Mess

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan peralatan/perengkapan rumah jabatan/dinas/mess, dan terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran, dan jaringan rumah dinas DPRD Prov. Sumbar. Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap peralatan pada rumah dinas yang kerusakan/pemeliharaannya di bawah perkiraan.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, yaitu :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan staf terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini baru dapat terlaksana jika adanya dasar-dasar yang relevan seperti undangan atas kerjasama Pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan. Pada kegiatan ini adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait serta sisa kegiatan merupakan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terpakai karena sedikitnya kegiatan sosialisasi di dalam daerah

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** ada 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, yaitu :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, dalam pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran BBM, foto copy, cetak dan penggandaan. Efisiensi mendasar terutama pada biaya penggandaan, dimana beberapa penggandaan dilaksanakan menggunakan mesin fotocopy yang ada di lingkungan DPRD.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** ada 8 (delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda

Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dalam pelaksanaan bertujuan agar tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Tidak tercapainya kinerja anggaran lebih disebabkan karena



adanya beberapa anggota Dewan yang tidak memaksimalkan jumlah hari perjalanan dinas, sedangkan untuk pencapaian kinerja seharusnya anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengikuti jumlah hari yang telah direncanakan.

b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekreraris DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD terhadap bidang tugasnya. Sisa merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Provinsi Sumatera Barat serta luar negeri dengan tujuan melihat perkembangan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat unuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Pada dasarnya kinerja fisik telah tercapai, namun kinerja keuangan tidak tercapai karena adanya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waku pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran kegiatan luar negeri.

d. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan peraturan perundangan-undangan yang dihasilkan oleh Dewan dalam satu tahun Anggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar terlaksana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kinerja keuangan tidak tercapai karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waku pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan.

e. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan sekaligus menelaah dan mengkaji persoalan yang berkembang untuk menyusun kebijakan tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi agar terwujudnya keserasian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sisa karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waku pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan.

f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2018. Pada pelaksanaan adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waku pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan.

Sedangkan beberapa kegiatan yang memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan baik fisik maupun keuangan dengan rincian :
  - a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**  
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan agar terwujudnya Pengiriman surat yang tepat sasaran.
  - b. **Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Komunikasi. Air dan Listrik Sekretariat DPRD Prov. Sumbar
  - c. **Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**
  - d. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**  
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan agar tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran tugas.
  - e. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**  
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertujuan untuk agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan Kantor.
  - f. **Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**  
Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan agar tercapainya ketersediaan penerangan pada bangunan perkantoran.
  - g. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jasa pemeliharaan dan peralatan rumah tangga keperluan kantor untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kedewanan.
  - h. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan referensi/bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD
  - i. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah**  
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah ditujukan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi baik ke luar maupun ke luar provinsi Sumatera Barat.
  - j. **Penyediaan Makanan dan Minuman**  
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sasarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka melaksanakan rapat-rapat sebagai salah satu tugas pokok DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan
  - k. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**  
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ruangan kantor sekretariat DPRD melalui pengadaan petugas kebersihan.
  - l. **Penyediaan Jasa Tenaga Sopir**  
Kegiatan Jasa Tenaga Sopir ditujukan untuk menjamin ketersediaan tenaga sopir untuk tugas-tugas anggota dewan dan staf sekretariat DPRD melalui pengadaan Tenaga Sopir.

- m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ditujukan untuk menjamin keamanan situasi dan kondisi lingkungan perkantoran sekretariat DPRD melalui pengadaan tenaga pengamanan kantor.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdapat 8 (delapan) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya :
- a. Pengadaan Meubelair  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan meubelair ruangan untuk gedung baru.
  - b. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi  
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi pada kantor sekretariat DPRD, disesuaikan dengan kebutuhan gedung lama dan gedung baru.
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair  
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pemeliharaan meubelair pada kantor Sekretariat DPRD.
  - d. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD  
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD..
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Installasi dan Jaringan  
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan installasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran tugas.
  - f. Pengadaan Peralatan/perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess pada kantor Sekretariat DPRD.
  - g. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional  
Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan mobil dinas untuk sekretaris DPR Provinsi Sumatera Barat.
  - h. Pembangunan Gedung Kantor  
Kegiatan ini bertujuan untuk lanjutan pembangunan gedung kantor baru.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, terdapat 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai terhadap keseragaman penggunaan pakaian dinas sesuai dengan aturan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdapat 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kinerja untuk pendukung kelancaran tugas perbantuan kedewanan.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan** terdapat 2 (dua) kegiatan yang memenuhi target yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan dan memproses sistem anggaran pada sekretariat DPRD untuk kelancaran administrasi keuangan.
  - b. Penatausahaan Keuangan OPD  
Kegiatan penatausahaan keuangan OPD bertujuan untuk menata dan menyusun pelaksanaan kegiatan keuangan OPD di Sekretariat DPRD dengan baik dari awal pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan.
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** terdapat 5 (lima) kegiatan yang memenuhi target yaitu :
- a. Reses  
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing guna pembangunan di prov. Sumatera Barat.
  - b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan kunjungan kerja ke dalam daerah Sumatera Barat
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda  
Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan tamu pemda yang berkunjung untuk urusan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat.
  - d. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda yang kemudian ditetapkan menjadi Perda.
  - e. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat melalui sekretariat DPRD mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat.

| Program / Kegiatan                                      | Pagu                      | Realisasi                 |              | Sisa                    | Hasil / Outcome   | Indikator Output Kegiatan  |      |             | Permasalahan / Hambatan   |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---|--|------|-------------|---|
|   |                           | Rp.                       | Rp.          |                         |   | %  | Rp.  | Kuantitatif |   |
|   | Target                    |                           |              | Realisasi               |   |  |      |             |   |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                   | <b>149.995.948.688,00</b> | <b>142.388.215.266,00</b> | <b>94,93</b> | <b>7.610.633.422,00</b> |   |  |      |             |   |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                           | <b>47.996.643.965,00</b>  | <b>47.655.853.269,00</b>  | <b>99,29</b> | <b>340.790.696,00</b>   |   |  |      |             |   |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                 | <b>101.999.304.723,00</b> | <b>94.732.361.997,00</b>  | <b>92,88</b> | <b>7.268.992.726,00</b> |   |  |      |             |   |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>       | <b>15.645.833.356,00</b>  | <b>15.285.402.600,00</b>  | <b>97,7</b>  | <b>363.330.756,00</b>   | <b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | Pelayanan Administrasi Perkantoran   |      |             |   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 1.810.335.870,00          | 1.769.434.300,00          | 97,74        | 40.901.570,00           | Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas                   | Tersedianya benda pos materai 6000 dan 3000, pengiriman surat dan honor pegawai PTT selama 12 bulan                            | 100% | 100%        |   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.761.600.000,00          | 1.664.297.217,00          | 94,48        | 97.302.783,00           | Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet | 1 Tersedianya pembayaran internet, SIPKD, Jaringan FO untuk 12 bulan<br>2 Lancarnya kegiatan operasional kantor untuk 12 bulan | 100% | 100%        | Tagihan listrik air telpon di bawah perkiraan (penghematan pemakaian listrik air telepon) |

|  |                |                |       |              |   |   |      |      |  |
|--|----------------|----------------|-------|--------------|---|---|------|------|--|
| Penyediaan<br>Jasa Jaminan<br>Barang Milik<br>Daerah             | 359.250.000,00 | 351.325.270,00 | 97,79 | 7.924.730,00 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung                           | Tersedianya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor dan gedung (premi Asuransi BMD dan PBB) untuk 12 bulan  | 100% | 100% |  |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 352.885.700,00 | 343.860.445,00 | 97,44 | 9.025.255,00 | Tercapainya ketersediaan ATK  | Tersedianya alatt tulis kantor untuk 12 bulan, perlengkapan kantor  | 100% | 100% |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 308.557.350,00 | 306.052.800,00 | 99,19 | 2.504.550,00 | Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digand akan dari jumlah yang dibutuhkan | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan  | 100% | 100% |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 118.160.000,00 | 114.541.600,00 | 96,94 | 3.618.400,00 | Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor                    | <p>Terpenuhi kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan kantor untuk 12 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baterai, Bola Lampu, MCB dll</li> <li>- Lampu LED 23 watt (gedung baru)</li> </ul> | 100% | 100% |  |

|   |                  |                  |       |               |   |   |      |      |  |  |
|---|------------------|------------------|-------|---------------|---|---|------|------|--|--|
|   |                  |                  |       |               | sekretariat dewan   |   |      |      |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | 4.034.493.000,00 | 3.994.379.200,00 | 99,01 | 40.113.800,00 | Tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 100% | 100% |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Pengadaan peralatan/perlengkapan pakai habis                          |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - AC Standing   |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Mesin Foto Copy, Mesin Penghancur Kertas                              |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Mesin Air, Tempat Air Panas, Mesin Pendingin/Minibar                  |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Meja Kerja, Meja Ketua  |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Meja Rapat Modular Komisi, Meja Rapat Typical                         |      |      |  |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Kursi Kerja, Sofa Lounge tipe 1, Sofa Lounge tipe 2                   |      |      |  |  |
| Kursi Kepala Rapat, Kursi Anggota Rapat, Kursi Rapat Cantilever |                  |                  |       |               |   |   |      |      |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | 44.130.000,00    | 37.367.250,00    | 84,68 | 6.762.750,00  | Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada                             | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                      | 100% | 100% | Adanya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga yang tidak terlaksana |  |
|   |                  |                  |       |               |   | - Pengadaan alas meja kecil, gelas hs, tutup gelas, stoples kue, piring |      |      |  |  |

|   |                  |                  |       |               |  |   |      |      |   |
|---|------------------|------------------|-------|---------------|--|---|------|------|---|
|   |                  |                  |       |               | kantor sekretariat DPRD  | kue kecil, tempat tisu, cangkir teh, sendok makan dan sendok garpu besar                  |      |      |   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | 592.230.000,00   | 572.637.000,00   | 96,69 | 19.593.000,00 | Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD | Tersedianya bahan bacaan, surat kabar daerah dan nasional                                 | 100% | 100% |   |
|   |                  |                  |       |               | -  | 13 jenis koran  |      |      |   |
|   |                  |                  |       |               | -  | 1 jenis majalah dan 11 jenis buku bacaan  |      |      |   |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 3.042.667.415,00 | 3.034.850.590,00 | 99,74 | 7.816.825,00  | Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi            | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke luar dan dalam daerah untuk 12 bulan          | 100% | 100% |   |
| Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur         | 39.950.000,00    | 31.900.000,00    | 79,85 | 8.050.000,00  | Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD  | Terlaksananya pembayaran jasa layanan pembinaan mental aparatur, pembinaan fisik aparatur | 100% | 100% | Adanya kegiatan di mesjid raya sehingga honor penceramah berlebih dan jumlah rapat paripurna yang di bawah perkiraan membuat honor pembaca Al-Quran tidak |
|   |                  |                  |       |               | -  | Instruktur senam, rohaniawan pengambil sumpah, pembaca Al Quran dan penceramah agama      |      |      |   |



|   |                  |                  |       |               |  |   |        |      | teralisasi<br>seluruhnya  |
|---|------------------|------------------|-------|---------------|--|---|--------|------|---|
| Penyediaan Makanan dan Minuman  | 1.045.898.100,00 | 1.045.891.500,00 | 100   | 6.600,00      | Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD | Tersedianya makan dan minum untuk 12 bulan  | 100%   | 100% |   |
| Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD  | 312.880.150,00   | 281.794.500,00   | 90,06 | 31.085.650,00 | Tertatanya Administrasi arsip dengan baik                                      | Tersedianya kebutuhan pengelolaan arsip aktif dan pasif untuk 1 tahun             | 100%   | 100% | Adanya efisiensi penggunaan anggaran  |
| Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD | 110.467.500,00   | 78.000.000,00    | 70,61 | 32.467.500,00 | Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar                   | Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Prov. Sumbar sebanyak 65 orang | 65 org |      | Masih ada anggota DPRD yang tidak melaksanakan check up sehingga menyebabkan anggaran check up tidak terealisasi seluruhnya |

|  |                               |                               |              |                       |  |   |      |      |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|------|------|--|
| Penyediaan<br>Jasa<br>Kebersihan<br>Kantor                               | 792.845.376,00                | 759.803.156,00                | 95,83        | 33.042.220,00         | Tersedianya<br>Kenyamanan<br>dan<br>Kebersihan<br>Kantor                                   | Tersedianya jasa petugas<br>dan peralatan kebersihan<br>kantor untuk 12 bulan   | 100% | 100% |  |
|  |                               |                               |              |                       |  | - Honorarium jasa<br>kebersihan 23 orang  |      |      |  |
| Penyediaan<br>Jasa Tenaga<br>Sopir                                       | 379.715.616,00                | 376.427.348,00                | 99,13        | 3.288.268,00          | Tersedianya<br>Kenyamanan<br>Kantor  | Tersedianya jasa sopir<br>kantor sebanyak 12 sopir  | 100% | 100% |  |
| Penyediaan<br>Jasa Pengaman<br>Kantor                                    | 539.767.279,00                | 519.940.424,00                | 96,33        | 19.826.855,00         | Tersedianya<br>Keamanan<br>dan<br>Kenyamanan<br>Kantor                                     | Terlaksananya jasa<br>pengamanan kantor<br>sebanyak 17 orang jasa<br>pengamanan   | 100% | 100% |  |
| <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Sarana dan<br/>Prasarana<br/>Aparatur</b> | <b>19.867.100.021,0<br/>0</b> | <b>19.352.055.515,0<br/>0</b> | <b>97,41</b> | <b>515.044.506,00</b> | Terlaksananya<br>Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur                        | Terlaksananya Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur   | 100% | 100% |  |
| Pengadaan<br>Mebeleur  | 3.632.479.000,00              | 3.590.559.200,00              | 98,85        | 41.919.800,00         | Tercapainya<br>ketersediaan<br>meubelair<br>yang ada pada<br>kantor<br>Sekretariat<br>DPRD | Tercapainya ketersediaan<br>meubelair yang ada pada<br>kantor Sekretariat DPRD  | 100% | 100% |  |
|  |                               |                               |              |                       |  | - Filling Kabinet   |      |      |  |
|  |                               |                               |              |                       |  | - Rak/lemari buku, rak<br>koran, rak majalah,<br>lemari katalog, rak audio<br>visual, rak display buku,<br>locker type 468, papan |      |      |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>pengumuman, lemari arsip ruang keuangan, lemari arsip ruang persidangan, lemari arsip ruang gudang peralatan, lemari</p>   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <p>- Caffe Table, sofa lounge tipe 1, metal cutting panel receptionist, metal cutting panle lounge, logo DPRD Sumbar, logo lounge, backdrop glassboard 2, lemari rapat typical, side table, bookshelFs, lemari + pantry tipe 1, backdrop TV tipe 1, credenza, lemari + pantry tipe 2, backdrop TV tipe 2, lemari file, lambang garuda, kursi receptionist, kursi kerja staf komisi, meja receptionist, meja buffet, meja lampu, meja buffet tinggi, meja kerja staf komisi, lampu gantung</p> |  |  |  |

|   |                |                |       |               |  |  |      |      |  |
|---|----------------|----------------|-------|---------------|--|--|------|------|--|
|   |                |                |       |               |  | receptionist, lampu meja lounge, foto presiden wakil presiden + figura                               |      |      |  |
| Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi             | 279.035.000,00 | 238.179.160,00 | 85,36 | 40.855.840,00 | Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD             | Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD   | 100% | 100% | Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan printer untuk bagian keuangan harganya jauh di bawah perencanaan anggaran |
|   |                |                |       |               |  | - Laptop/notebook 1 unit   |      |      |  |
|   |                |                |       |               |  | - Komputer PC 14 unit  |      |      |  |
|   |                |                |       |               |  | - Scanner 6 unit, Printer inkjet 5 unit, Printer 9 unit, Fax 1 unit                                  |      |      |  |
| Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi | 571.850.000,00 | 551.922.700,00 | 96,52 | 19.927.300,00 | Tercapainya ketersediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | Tercapainya Ketersediaan alat studio, komunikasi dan informasi yang ada pada kantor sekretariat DPRD | 100% | 100% |  |
|   |                |                |       |               |  | - Infocus 2 unit, Projector 4 unit   |      |      |  |
|   |                |                |       |               |  | - Kamera Shooting 1 unit, Kamera Tustel 2 unit, handycam 2 unit                                      |      |      |  |
|   |                |                |       |               |  | - Smart TV 2 unit, Led TV 42'/32' 5 unit, LED TV 32' 65 unit LED 42' 2 unit                          |      |      |  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan                      | 62.400.000,00  | 49.659.800,00  | 79,58 | 12.740.200,00 | Terlaksananya pemeliharaan alat studio,  | Pemeliharaan Peralatn studio, komunikasi dan   | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari   |

|  |                |                |       |               |  |   |      |      |   |
|--|----------------|----------------|-------|---------------|--|---|------|------|---|
| Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi             |                |                |       |               | komunikasi dan informasi kantor                        | informasi kantor untuk 1 tahun  |      |      | perkiraan pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio yang kerusakannya di bawah perkiraan   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | 811.472.600,00 | 764.380.150,00 | 94,2  | 47.092.450,00 | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor               | Pemeliharaan Gedung Kantor untuk 1 tahun,   | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap gedung kantor yang kerusakannya di bawah perkiraan dan sisa kegiatan sewa bunga hias |
|  |                |                |       |               |  | - Bahan pembersih, sewa bunga hidup dan pemeliharaan gednug dan bangunan  |      |      |   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas | 861.130.000,00 | 797.944.099,00 | 92,66 | 63.185.901,00 | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Pemeliharaan kendaraan operasional  | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas operasional yang   |
|  |                |                |       |               |  | - 12 unit innova, 1 unit Mitsubishi Pajero, 5 unit Toyota Camry, 3 unit Toyota Fortuner, 2 unit Nissan Terrano, 7 unit Avanza, 4 unit bus |      |      |   |

|  |                |                |       |               |  |   |      |      |  |
|--|----------------|----------------|-------|---------------|--|---|------|------|--|
|  |                |                |       |               |  | (2005), 1 unit pick up<br>(2005), 2 unit Toyota Hiace, 21 unit Sepeda Motor, KIR, Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan              |      |      | kerusakan/pemeliharaan di bawah perkiraan  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor | 374.975.000,00 | 323.970.970,00 | 86,4  | 51.004.030,00 | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor   | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap AC Standing dan AC Split yang kerusakan/pemeliharaan di bawah perkiraan |
|  |                |                |       |               |  | - Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas, bbm dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor   |      |      |  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler                      | 89.750.000,00  | 88.455.000,00  | 98,56 | 1.295.000,00  | Terpeliharanya Meubelair Kantor                  | Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeulair kantor   | 100% | 100% |  |
|  |                |                |       |               |  | Biaya Perbaikan Meja, Kunci dan Kaca Meja, Brankas, Filling Kabinet dan lemari Besi, cuci kursi kantor dan Pemeliharaan kunci-kunci Ruangan |      |      |  |

|  |                |                |       |               |   |   |      |      |   |
|--|----------------|----------------|-------|---------------|---|---|------|------|---|
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 38.000.000,00  | 24.443.500,00  | 64,33 | 13.556.500,00 | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor | Pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor untuk 1 tahun       | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap komputer, printer dan laptop yang kerusakan/pemeliharaanannya di bawah perkiraan |
| Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD              | 288.515.600,00 | 280.933.326,00 | 97,37 | 7.582.274,00  | Tertatanya administrasi asset dengan baik                             | Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD untuk 1 tahun | 100% | 100% |   |
| Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                      | 45.000.000,00  | 35.920.000,00  | 79,82 | 9.080.000,00  | Terwujudnya pelayanan yang terbaik                                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dokumen                                   | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan sisa pembayaran kegiatan perencanaan yang akan dibayarkan setelah fisik perencanaan selesai   |

|   |                |                |       |               |   |  |      |      |   |
|---|----------------|----------------|-------|---------------|---|--|------|------|---|
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan               | 140.000.000,00 | 138.386.500,00 | 98,85 | 1.613.500,00  | Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor                                | Terlaksananya pemeliharaan rutin instalasi dan jaringan kantor untuk 1 tahun   | 100% | 100% |   |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                        | 344.290.000,00 | 259.866.339,00 | 75,48 | 84.423.661,00 | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris   | Pemeliharaan kendaraan<br>1 unit Toyota Kijang, 2 Unit Sedan Camry, 2 unit Minibus Fortuner, BBM, Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan   | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas jabatan yang kerusakannya/pemeliharaannya di bawah perkiraan |
| Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess | 784.325.000,00 | 771.649.750,00 | 98,38 | 12.675.250,00 | Tersedianya perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess | Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas/mess dan kebutuhan pokok Ketua DPRD untuk 1 tahun<br>- Sarung, Kursi, seprai lengkap, bantal guling, stoples, gelas, alas meja makan besar, alas meja tamu, alat bofet panjang, asbak kristal, piring sambal, meja setrika, gelas tamu, keset, | 100% | 100% |   |



|  |                |                |       |               |   |   |      |      |  |
|--|----------------|----------------|-------|---------------|---|---|------|------|--|
|  |                |                |       |               |   | prasmanan set besar,<br>pajangan kristal,<br>bendaera tes plang,<br>piring sambal pyrex,<br>alas/keset kaki   |      |      |  |
|  |                |                |       |               |   | - Kasur   |      |      |  |
|  |                |                |       |               |   | - Alat Musik  |      |      |  |
|  |                |                |       |               |   | - AC floor standing   |      |      |  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Dinas / Mess                          | 542.000.000,00 | 512.098.658,00 | 94,48 | 29.901.342,00 | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/ mess                | Pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess, tersedianya jasa petugas satpam dan cleaning service untuk 1 tahun, 6 orang pengaman, 5 orang petugas kebersihan | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap gedung rumah dinas yang kerusakan/pemeliharaan di bawah perkiraan |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess | 189.250.000,00 | 160.057.000,00 | 84,57 | 29.193.000,00 | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/ mess | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas<br>- Pengisian tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan peralatan         | 100% | 100% | Sisa kegiatan merupakan efisiensi dari perkiraan pemeliharaan rutin terhadap peralatan pada  |

|   |                         |                         |             |                     |  |   |      |      |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--|---|------|------|--|
|   |                         |                         |             |                     |  | dan jaringan rumah dinas DPRD Prov. Sumbar  |      |      | rumah dinas yang rusak/pemeliharaan di bawah perkiraan |
| Pengadaan Mobil Jabatan                         | 395.350.000,00          | 394.910.000,00          | 99,89       | 440.000,00          | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar | Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas bermotor<br>- Pengadaan 1 unit kendaraan roda 4   | 100% | 100% |  |
| Pembangunan Gedung Kantor                       | 10.417.277.821,00       | 10.368.719.363,00       | 99,53       | 48.558.458,00       | Meningkatnya pelayanan yang terbaik  | Terlaksananya pembangunan gedung baru 1 unit gedung   | 100% | 100% |  |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>    | <b>1.049.863.000,00</b> | <b>1.048.800.987,00</b> | <b>99,9</b> | <b>1.062.013,00</b> | Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur  | Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur   | 100% | 100% |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1.049.863.000,00        | 1.048.800.987,00        | 99,9        | 1.062.013,00        | Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan anggota DPRD dalam                          | - Terlaksananya Pakaian Dinas PNS/PH dan Anggota DPRD<br>- 65 stel PDH, 130 stel PSH, 65 stel PSR, 65 stel PSL, 65 stel Pakaian Daerah, 3 stel PSL PAW, | 100% | 100% |  |

|  |                       |                       |              |                     |  |   |        |        |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|---|--------|--------|--|
|  |                       |                       |              |                     | berpakaian dinas   | 9 buah Lambang Daerah Emas + Upah (Pimpinan dan Anggota DPRD)   |        |        |  |
|  |                       |                       |              |                     |  | - 110 stel Pakaian Dinas PNS, 19 stel Pakaian Dinas PH, 14 stel Pakaian Dinas Tenaga Ahli, 12 stel Pakaian Dinas Protokol |        |        |  |
|  |                       |                       |              |                     |  | - 9stel Pakaian Satpol PP dan kelengkapannya  |        |        |  |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  | <b>153.532.400,00</b> | <b>144.189.443,00</b> | <b>93,91</b> | <b>9.342.957,00</b> | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 42 org | 42 org |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 93.505.000,00         | 91.353.043,00         | 97,7         | 2.151.957,00        | Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK         | Terlaksananya pengiriman Staf untuk mengikuti Bimtek dan Pelatihan sebanyak 12 orang                                      | 12 org | 12 org |  |
| Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan               | 60.027.400,00         | 52.836.400,00         | 88,02        | 7.191.000,00        | Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang              | Terlaksananya pengiriman Staf untuk mengikuti Sosialisasi sebanyak 30 orang   | 30 org | 30 org | Sisa kegiatan merupakan sisa perjalanan dinas dalam daerah |

|   |                       |                       |              |                      |  |  |         |         |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--|---------|---------|--|
|   |                       |                       |              |                      | peraturan perundang-undangan   |  |         |         | yang tidak terpakai karena sedikitnya kegiatan sosialisasi di dalam daerah |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>844.714.572,00</b> | <b>819.765.252,00</b> | <b>97,05</b> | <b>24.949.320,00</b> | Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100%    | 100%    |  |
| Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | 242.934.635,00        | 237.368.615,00        | 97,71        | 5.566.020,00         | Tersedianya Renja, RKA, DPA  | Tersusunnya Renja, RKA, DPA sebanyak 3 laporan                                       | 1 tahun | 1 tahun |  |
| Penatausahaan Keuangan SKPD   | 399.208.737,00        | 397.118.337,00        | 99,48        | 2.090.400,00         | Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD                                     | Terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD selama 12 bulan                    | 100%    | 100%    |  |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  | 202.571.200,00        | 185.278.300,00        | 91,46        | 17.292.900,00        | Tersedianya buku laporan kinerja   | Tersusunannya LAKIP, LPPD, LKPJ, PK dan  | 100%    | 100%    | Efisiensi mendasar terutama pada   |

|   |                                     |                                     |              |                                    |  |   |      |      |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|---|------|------|---|
| dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   |                                     |                                     |              |                                    | kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)   | Laporan Keuangan sebanyak 3 dokumen   |      |      | biaya penggandaan, dimana beberapa penggandaan dilaksanakan menggunakan mesin fotocopy yang ada dilingkungan DPRD |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b> | <b>64.438.261.374,0</b><br><b>0</b> | <b>58.082.148.200,0</b><br><b>0</b> | <b>90,14</b> | <b>6.356.113.174,0</b><br><b>0</b> | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                               | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                | 100% | 100% |   |
| Pembahasan Rancangan Perda  | 24.259.906.007,0<br>0               | 22.248.953.021,0<br>0               | 91,71        | 2.010.952.986,0<br>0               | Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah | Terlaksananya pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD sebanyak 21 Ranperda/keputusan | 100% | 100% | Adanya beberapa Anggota Dewan yang tidak memaksimalkan jumlah hari perjalanan dinas                               |

|   |                   |                   |       |                  |  |  |      |      |                                      |
|---|-------------------|-------------------|-------|------------------|--|--|------|------|--------------------------------------|
| Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD | 4.992.198.808,00  | 4.629.864.692,00  | 92,74 | 362.334.116,00   | Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang | - Terlaksananya workshop/pendalaman tugas dan studi komparatif ke provinsi lain yang dianggap lebih berhasil | 100% | 100% | Adanya efisiensi penggunaan anggaran |
|   |                   |                   |       |                  |  | - -Workshop 4 kali dalam daerah, 3 kali luar provinsi untuk 65 orang Anggota DPRD dan 2 kali ADPSI           |      |      |                                      |
| Reses   | 7.087.259.050,00  | 6.835.919.660,00  | 96,45 | 251.339.390,00   | Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat    | - Tertampungnya aspirasi masyarakat  | 100% | 100% |                                      |
|   |                   |                   |       |                  |  |  |      |      |                                      |
| Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah      | 6.373.615.900,00  | 6.273.336.200,00  | 98,43 | 100.279.700,00   | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | Terlaksananya fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan, kunker pimpinan dan komisi-komisi dalam daerah | 100% | 100% |                                      |
| Kunjungan Kerja Pimpinan dan                                | 15.762.145.739,00 | 12.431.803.677,00 | 78,87 | 3.330.342.062,00 | Terwujudnya peningkatan  | Terlaksananya fungsi pembentukan perda,  | 100% | 100% | Adanya kegiatan kunjungan kerja      |

|  |                  |                  |       |               |   |   |      |      |   |
|--|------------------|------------------|-------|---------------|---|---|------|------|---|
| Komisi Luar Daerah   |                  |                  |       |               | wawasan dan kinerja DPRD                            | anggaran, pengawasan, kunker pimpinan dan komisi-komisi luar daerah dan luar negeri |      |      | ke luar negeri yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran kegiatan luar negeri |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda                           | 1.769.869.720,00 | 1.763.974.900,00 | 99,67 | 5.894.820,00  | Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah | Terselenggaranya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah untuk 1 tahun                | 100% | 100% |   |
| Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan | 144.080.000,00   | 128.726.700,00   | 89,34 | 15.353.300,00 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum    | Terjalinya kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan                      | 100% | 100% | Adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan   |

|   |                  |                  |       |                |   |  |      |      |  |
|---|------------------|------------------|-------|----------------|---|--|------|------|--|
|   |                  |                  |       |                |   |  |      |      | karena padatnya agenda kedewanan   |
| Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | 169.407.800,00   | 126.574.700,00   | 74,72 | 42.833.100,00  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum                                  | Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan sebanyak 8 kajian peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | Adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan |
| Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | 145.174.000,00   | 143.734.200,00   | 99,01 | 1.439.800,00   | Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi | Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi  | 100% | 100% |  |
| Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | 3.041.975.350,00 | 2.905.513.950,00 | 95,51 | 136.461.400,00 | Terpublikasiny a kegiatan kedewanan di media cetak                                | Tersedianya dokumen publikasi pelaksanaan kegiatan kedewanan untuk 1 tahun   | 100% | 100% |  |



|  |                           |                           |              |                         |   |  |      |      |  |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---|--|------|------|--|
|  |                           |                           |              |                         | dan media elektronik  |  |      |      |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | 692.629.000,00            | 593.746.500,00            | 85,72        | 98.882.500,00           | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | Meningkatnya pemahaman masyarakat dengan tersosialisasikannya peraturan peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | Adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan |
|  | <b>149.995.948.688,00</b> | <b>142.388.215.266,00</b> | <b>94,93</b> | <b>7.610.633.422,00</b> |   |  |      |      |  |

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencananya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kedepan perlu kehatian-hatian dalam menyusun Rencana Kerja dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.C.29, pada tabel T.C.29 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

TABEL T.C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018  
Provinsi Sumatera Barat**

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) /<br>Kegiatan (Output)   | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun 2017 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan<br>tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                             | Target<br>program<br>dan<br>kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>n-1) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |   | Ket |
|------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|--|---|---|-----|
|      |  |   |   |  | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>(n-2)              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun (n-2) | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>s/d<br>tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |     |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8 = ( 7 / 6 )               | 9  | 10  | 11  | 12  |
|      | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Perkantoran</b>                  | <b>Persentase<br/>pelayanan<br/>administrasi<br/>perkantoran</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |     |
|      | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | Terkirimnya surat<br>yang tepat sasaran<br>selama 1 tahun   | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn                       | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |     |
|      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik              | Pembayaran biaya<br>telepon, air, listrik dan<br>kawat / faksimili /<br>internet / VPN untuk 1<br>tahun   | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn                       | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |     |
|      | Penyediaan Jasa<br>Jaminan Barang Milik<br>Daerah                          | Pembayaran PBB dan<br>premi asuransi untuk<br>1 tahun   | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn                       | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |     |
|      | Penyediaan Jasa<br>Kebersihan Kantor,<br>Pengamanan dan<br>Sopir Kantor    | Pembayaran retribusi<br>sampah dan jasa<br>cleaning service untuk<br>1 tahun, Pembayaran<br>honorarium sopir<br>kantor sebanyak 12<br>orang, Pembayaran<br>honorarium satpam<br>kantor sebanyak 22<br>orang | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn  | 1 thn                       | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |     |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang                                    | 1 kali  | 1 kali  | 1 kali  | 1 kali  | 1 kali  | 1 kali  | 1 kali  |   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan  | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Cetak dan penggandaan selama 12 bulan   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  | Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga   | Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit                            | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   | 2 paket   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar                               | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   | 6 paket   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun                           | 13 paket  | 10 paket  | 10 paket  | 10 paket  | 10 paket  | 10 paket  | 13 paket  | 13 paket  |  |
|  |  |  |  |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah                          | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun                  | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah | laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur   | Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   |  |
|  |  |  |  |  | Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip OPD   | Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun                         | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   | 5 paket   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun                             | 1 thn   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 thn   | 1 thn   |  |

|  |  |  |  |  |   |  |         |          |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--|--|--|--|--|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Sopir Kantor                              | Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang   | 1 thn   | 1 tahun  |         |         |         |         |         | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                         | Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang  | 1 thn   | 1 tahun  |         |         |         |         |         | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor  | 1 thn   | 10 macam |         |         |         |         |         | 1 thn   | 1 thn   |  |
|  |  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik</b>                            |         |          |         |         |         |         |         |         |         |  |
|  |  |  |  |  | Pembangunan Gedung Kantor                                 | 1 unit gedung kantor   | 1       | 0.3      | 0.7     | 0.7     | 0.7     | 0.0     | 0.3     | 1       |         |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                     | Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit  | 4 unit  | 2 unit   | 2 unit  | 2 unit  | 2 unit  | 2 unit  | 4 unit  | 4 unit  |         |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur   | 3 paket | 9 paket  | 9 paket | 9 paket | 9 paket | 9 paket | 3 paket | 3 paket |         |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor            | Laptop, PC, Scanner, Printer Photo, Printer, Kamera Shoting, Kamera Tustel, Handycam, CD Player, Televisi, Alat Fitnes, Alat Musik | 1 thn   | 1 thn    | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |         |         |         |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan mebeleur  | Alat kantor dan Alat Rumah Tangga  | 9 paket | 2 paket  | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 9 paket | 9 paket |         |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess | Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun   | 1 tahun | 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                  | Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun   | 1 tahun | 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                  | Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun   | 1 tahun | 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |  |

|  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun   | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |         |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |         |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur                                       | Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |         |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor                   | Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun, Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun, Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun | 1 tahun | 1 thn   |         |         |         |         | 1 tahun | 1 tahun |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan                          | Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |         |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess                       | Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan  | 1 unit  | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                  | Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor  | 1 unit  | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   | 1 thn   |         |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi                              | UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit  | 1 tahun | 4 paket |         |         |         |         | 1 tahun | 1 tahun |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi                       | Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit   | 1 tahun | 4 paket |         |         |         |         | 1 tahun | 1 tahun |

|  |  |  |  |  |   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi       | Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun  | 1 tahun     | 1 tahun     |             |             |             |             | 1 tahun     | 1 tahun     |             |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun  | 1 tahun     | 1 tahun     | 1 tahun     | 1 tahun     | 1 tahun     | 1 tahun     |             |             |             |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi              | Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun                                    | 1 tahun     | 1 tahun     |             |             |             |             | 1 tahun     | 1 tahun     |             |  |
|  |  |  |  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD                            | Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset | 1 tahun     | 1 tahun     |             |             |             |             | 1 tahun     | 1 tahun     |             |  |
|  |  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                  | <b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                                | Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang  | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     |  |
|  |  |  |  |  | Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024 |   | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|  |  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                     | <b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|  |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan                                  | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah   | 12 kali     | 10 kali     | 15 kali     | 15 kali     | 15 kali     | 15 kali     | 12 kali     | 12 kali     |             |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                    | Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah   | 10 kali     | 24 orang    | 24 orang    | 24 orang    | 24 orang    | 24 orang    | 10 kali     | 10 kali     |             |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Sumber Daya Aparatur   | Peningkatan wawasan untuk 4   | 0           | 4 bagian    |             |             |             |             |             |             |             |  |

|  |  |  |  |  |  |   |   |           |           |           |           |           |           |
|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  |  |  |  |  | bagian pada Sekretariat DPRD  |   |           |           |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan Kantor Sendiri  | Terlaksananya pelatihan pegawai Sekretariat DPRD untuk 50 orang   | 0         | 50 orang  |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b> |           |           |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                   | Tersedianya laporan keuangan OPD  | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen |
|  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Keuangan OPD  | Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD untuk 1 tahun  | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD   | Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan   | 1 tahun   | 3 dokumen |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | <b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset</b> | <b>Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra, persentase kesesuaian Renja dengan RPJMD dan pengendalian asset OPD</b>   |           |           |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD   | Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan   | 1 tahun   |           |           |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD                                      | Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset                                       | 1 tahun   |           |           |           |           |           |





|  |  |  |  |  |   |  |               |                             |           |           |           |           |               |               |
|--|--|--|--|--|---|--|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|  |  |  |  |  | dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar  |  |               |                             |           |           |           |           |               |               |
|  |  |  |  |  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | Tersusunnya dokumen publikasi  | 1 tahun       | 1 tahun                     | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun       | 1 tahun       |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  | Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota                                 | 2 laporan     | 2 laporan                   | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan     | 2 laporan     |
|  |  |  |  |  | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | Tersusunnya laporan hasil kajian   | 2 kajian      | 2 kajian                    | 2 kajian  | 2 kajian  | 2 kajian  | 2 kajian  | 2 kajian      | 2 kajian      |
|  |  |  |  |  | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar                            | 2 keg         | 5 keg                       | 5 keg     | 5 keg     | 5 keg     | 5 keg     | 2 keg         | 2 keg         |
|  |  |  |  |  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah | 1 tahun       | laporan 12 keg, 19 kab/kota |           |           |           |           | 1 tahun       | 1 tahun       |
|  |  |  |  |  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah  | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD                                 | 3 masa sidang | 6 keg                       |           |           |           |           | 3 masa sidang | 3 masa sidang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda  | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah                                | 1 tahun       | 1 tahun                     |           |           |           |           | 1 tahun       | 1 tahun       |

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2018 dengan jumlah Program sebanyak 6 program dan kegiatan sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

| No.        | Program/Kegiatan   |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan antara lain:</b>        |
| 1.         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
| 2.         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |
| 3.         | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah  |
| 4.         | Penyediaan Alat Tulis Kantor   |
| 5.         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |
| 6.         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |
| 7.         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |
| 8.         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |
| 9.         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |
| 10.        | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah  |
| 11.        | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur  |
| 12.        | Penyediaan Makanan dan Minuman   |
| 13.        | Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD   |
| 14.        | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD                  |
| 15.        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  |
| 16.        | Penyediaan Jasa Tenaga Sopir   |
| 17.        | Penyediaan Jasa Pengaman Kantor  |
| <b>II.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 18 (tujuh belas) kegiatan antara lain:</b> |
| 1.         | Pengadaan Mebeleur   |
| 2.         | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi  |
| 3.         | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi  |
| 4.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi                          |
| 5.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   |
| 6.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas   |
| 7.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor   |
| 8.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler  |
| 9.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi   |
| 10.        | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD  |
| 11.        | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor  |
| 12.        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan  |
| 13.        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan   |
| 14.        | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  |
| 15.        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess  |

|             |   |
|-------------|---|
| 16.         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  |
| 17.         | Pengadaan Mobil Jabatan   |
| 18.         | Pembangunan Gedung Kantor   |
| <b>III.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan antara lain:</b>  |
| 1.          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   |
| <b>IV.</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:</b>                              |
| 1.          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  |
| 2.          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan  |
| <b>V.</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 3 (tiga) kegiatan antara lain:</b> |
| 1.          | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  |
| 2.          | Penatausahaan Keuangan SKPD   |
| 3.          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |
| <b>VI.</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdapat 11 (sebelas) kegiatan antara lain:</b>             |
| 1.          | Pembahasan Rancangan Perda  |
| 2.          | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   |
| 3.          | Reses   |
| 4.          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  |
| 5.          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah   |
| 6.          | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda  |
| 7.          | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  |
| 8.          | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU |
| 9.          | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  |
| 10.         | Penyebarnya Informasi Pembangunan Daerah  |
| 11.         | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  |

Berdasarkan DPA dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan capaian kegiatan di atas 95%.

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 100 %, dengan batas minimal 95 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Sumatera Barat. Untuk tahun 2020 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan anggaran porsi terbesar sehingga dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tetap memperhatikan program dan kegiatan lainnya.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.C.30, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra

dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2018 dengan realisasi tahun 2018 dan perkiraan capaian pada tahun 2019.

**TABEL T.C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD : SEKRETARIAT DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KONDISI TAHUN 2018**

| NO       | INDIKATOR   | SPM /<br>STANDAR<br>NASIONAL | IKK (PP<br>6/2008) | TARGET RENSTRA OPD |               |               | REALISASI<br>CAPAIAN |           | PROYEKSI      |               | CATATAN<br>ANALISIS |
|----------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|
|          |   |                              |                    | TAHUN<br>2018      | TAHUN<br>2019 | TAHUN<br>2020 | TAHUN<br>2018        | %         | TAHUN<br>2019 | TAHUN<br>2020 |                     |
|          |   |                              |                    | thn (n-<br>1)      | thn (n)       | thn<br>(n+1)  | thn (n-<br>1)        |           | thn (n)       | thn<br>(n+1)  |                     |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                     | <b>4</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>      | <b>8</b>      | <b>9</b>             | <b>10</b> | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>13</b>           |
| 1        | Jumlah Peraturan Daerah disetujui / ditetapkan oleh DPRD  |                              |                    | 19 buah            | 19 buah       | 19 buah       | 19 buah              | 100%      | 19 buah       | 19 buah       |                     |
| 2        | Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) |                              |                    | 1.112 kali         | 1.112 kali    | 1.112 kali    | 1.112 kali           | 100%      | 1.112 kali    | 1.112 kali    |                     |
| 3        | Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)                                      |                              |                    | 12 buah            | 12 buah       | 12 buah       | 12 buah              | 100%      | 12 buah       | 12 buah       |                     |
| 4        | Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD                  |                              |                    | 19 buah            | 19 buah       | 19 buah       | 19 buah              | 100%      | 19 buah       | 19 buah       |                     |
| 5        | Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD  |                              |                    | 100%               | 100%          | 100%          | 100%                 | 100%      | 100%          | 100%          |                     |

**TABEL T.C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD : SEKRETARIAT DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KONDISI TAHUN 2018**

| No | Indikator  | Spm / Standar Nasional | IKK (Pp 6/2008) | TARGET RENSTRA OPD |            |            | Realisasi Capaian |       | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|--|------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-------------------|-------|------------|------------|------------------|
|    |  |                        |                 | Tahun 2018         | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2018        | %     | Tahun 2019 | Tahun 2020 |                  |
|    |  |                        |                 | Thn (N-1)          | Thn (N)    | Thn (N+1)  | Thn (N-1)         |       | Thn (N)    | Thn (N+1)  |                  |
| 1  | 2  | 3                      | 4               | 6                  | 7          | 8          | 9                 | 10    | 11         | 12         | 13               |
| 1  | Jumlah produk hukum yang dihasilkan fungsi legislasi   |                        |                 | 22 buah            | 22 buah    | 22 buah    | 19 buah           | 86.36 | 22 buah    | 22 buah    |                  |
| 2  | Persentase penyelesaian kegiatan fungsi anggaran   |                        |                 | 100%               | 100%       | 100%       | 100%              | 100%  | 100%       | 100%       |                  |
| 3  | Jumlah media yang mempublikasikan kegiatan DPRD  |                        |                 | 45 media           | 45 media   | 45 media   | 41 media          | 91.11 | 45 media   | 45 media   |                  |
| 4  | Jumlah dokumentasi hasil kegiatan DPRD   |                        |                 | 30 dokumen         | 30 dokumen | 30 dokumen | 30 dokumen        | 100%  | 30 dokumen | 30 dokumen |                  |
| 5  | Persentase pegawai yang mendukung kinerja dengan kebutuhan pegawai                                   |                        |                 | 100%               | 100%       | 100%       | 100%              | 100%  | 100%       | 100%       |                  |
| 6  | Persentase ketersediaan aset dengan kebutuhan  |                        |                 | 100%               | 100%       | 100%       | 100%              | 100%  | 100%       | 100%       |                  |
| 7  | Persentase kegiatan DPRD dengan layanan yang diberikan   |                        |                 | 100%               | 100%       | 100%       | 100%              | 100%  | 100%       | 100%       |                  |
| 8  | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja   |                        |                 | A                  | A          | A          | BB                | A     | A          | A          |                  |
| 9  | Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas |                        |                 | 100%               | 100%       | 100%       | 94%               | 95%   | 100%       | 100%       |                  |

**TABEL T.C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD : SEKRETARIAT DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KONDISI TAHUN 2018 - 2021**

| NO | INDIKATOR  | SPM /<br>STANDAR<br>NASIONAL | IKK (PP<br>6/2008) | TARGET RENSTRA OPD |               |               | REALISASI<br>CAPAIAN |      | PROYEKSI      |               | CATATAN<br>ANALISIS |
|----|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|------|---------------|---------------|---------------------|
|    |  |                              |                    | TAHUN<br>2018      | TAHUN<br>2019 | TAHUN<br>2021 | TAHUN<br>2018        | %    | TAHUN<br>2019 | TAHUN<br>2021 |                     |
|    |  |                              |                    | thn (n-1)          | thn (n)       | thn<br>(n+1)  | thn (n-1)            |      | thn (n)       | thn<br>(n+1)  |                     |
| 1  | 2  | 3                            | 4                  | 6                  | 7             | 8             | 9                    | 10   | 11            | 12            | 13                  |
| 1  | Persentase kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD   |                              |                    | 100%               | 100%          | 100%          | 100%                 | 100% | 100%          | 100%          |                     |
| 2  | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja   |                              |                    | A                  | A             | A             | A                    | A    | A             | A             |                     |
| 3  | Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas |                              |                    | 100%               | 100%          | 100%          | 100%                 | 100% | 100%          | 100%          |                     |
| 4  | Persentase jumlah kebutuhan anggaran program kegiatan dengan ketersediaan anggaran                   |                              |                    | 100%               | 100%          | 100%          | 100%                 | 100% | 100%          | 100%          |                     |



Berdasarkan pencapaian tahun 2018, secara global target fisik dan target keuangan kegiatan sudah tercapai, namun apabila dilihat secara parsial untuk target keuangan terdapat hampir separuh kegiatan tidak tercapai, termasuk di dalamnya program pokok kegiatan sejumlah 8 (delapan) kegiatan. Tidak tercapainya target keuangan masing-masing kegiatan dapat dipahami karena beberapa alasan logis seperti peran penggunaan dan optimalisasi keuangan bergantung kepada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemangku kepentingan. Sekretariat dalam hal ini selalu mengedepankan pelayanan terbaik, karena fungsi utama sekretariat sejalan dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengekoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Untuk tahun 2019 diperkirakan target yang ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pengendalian mendalam dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang tidak mencapai target keuangan pada tahun 2018. Evaluasi dilakukan dalam bentuk mencari solusi atas masalah yang akan terjadi mengacu kepada kegiatan tahun 2018. Sedangkan pengendalian dilakukan melalui pengetatan aliran kas dari per tiga bulan menjadi per bulan, hal tersebut dirasa efektif untuk mematangkan target agar sesuai dengan perencanaan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur dukungan staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2020 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Terlaksananya Fungsi, Tugas,

Wewenang dan Hak DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tolok ukur kedua adalah Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat sesuai dengan Standar Palayanan Prosedur (SOP). Tolok ukur ketiga adalah tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Prosentase Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Tolok ukur keempat adalah Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki dengan Indikator Kinerja adalah Presentase kesesuaian penempatan PNS antara disiplin ilmu dengan tugas pokok. Tolok ukur kelima adalah Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kinerjanya adalah Peningkatan kehadiran staf. Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Tabel T.VI.C.1 yang sudah ditampilkan di atas.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada struktur organisasi dengan tipe B. Dengan struktur organisasi tipe B, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing tiga subbagian.

#### **a. Tingkat Pelayanan kinerja OPD.**

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

#### **b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.**

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

2. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
  3. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
  4. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
  5. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  6. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
  7. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
  8. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
  9. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021; dimana Visi Pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada periode 2016–2021 adalah **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Kedua yaitu: **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya” yang akan dilaksanakan melalui program–program OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Program Utama **“Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”**

Program Penunjang:

- 1) Program Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah **“Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBD tepat waktu, jumlah Perda yang disetujui, jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** dalam kurun waktu 5 tahun.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (***strengths***)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi **fasilitasi** terhadap Lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan (***weaknesses***)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor yaitu: “Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (***Opportunities***)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public ke depan;

b. Tantangan/ancaman/hambatan (***Threats***)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang antara lain untuk menilai keserasian,

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L maupun Kabupaten/Kota.

- e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2020 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan mewujudkan **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”** merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk program pokok maupun program pendukung. Analisis kebutuhan juga meliputi indikator kinerja yang relevan untuk kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan atas aturan-aturan terbaru mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur melalui

Rancangan awal rencana kerja terdiri dari 6 (enam) program dan 50 (lima puluh) kegiatan. Terdapat beberapa perbedaan pada jumlah kegiatan dan besaran anggaran masing-masing kegiatan.

Pada rancangan awal RKPD, terdapat kegiatan dengan nomenklatur pokok kegiatan “Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan”. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena output dan outcome kegiatan tersebut tidak dapat diukur sehingga menyulitkan dalam membuat indikator kinerja. Di telaah dari aktivitas yang dilaksanakan serta hasil/keluaran kegiatan, maka kegiatan ” “Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan” lebih identik dengan kegiatan “Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU” karena pada dasarnya kegiatan Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya adalah untuk melakukan kajian produk hukum yang akan ditetapkan terhadap undang-undang yang lebih tinggi atau dampak terhadap peraturan-peraturan lainnya. Oleh sebab itu seluruh anggaran kegiatan “Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan” sebesar Rp. 83.215.000,- ditambahkan ke dalam kegiatan “Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU” sehingga total anggaran kegiatan “Kajian\*” adalah Rp. 176.404.800,-

Selain itu berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat beberapa pengelompokan seperti penempatan kegiatan pengadaan tenaga outsourcing untuk tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan antara gedung kantor dan rumah dinas masih dipisah. Pengadaan tenaga untuk gedung kantor dan rumah dinas memiliki teknis pengadaan yang sama sehingga untuk efisiensi, maka pengadaan tersebut akan digabung dalam satu kegiatan.

Faktor perubahan struktur organisasi berdasarkan Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan munculnya beberapa kegiatan baru yang spesifik dan sesuai dengan uraian tugas pada salah satu bagian dalam organisasi yaitu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Adapun kegiatan baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembahasan Penyusunan APBD
4. Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

**TABEL.T.C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No | Rancangan Awal RKPD                                     |        |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                |                         |  |                |                   | Ket |                           |
|----|---|--------|--|----------------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|-------------------|-----|---------------------------|
|    | Program / Kegiatan                                      | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan                                      | Lokasi                  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana    |     |                           |
|    | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                 |        |  |                |                     | <b>114.554.000.000,00</b>                               | <b>BELANJA LANGSUNG</b> |  |                |                   |     | <b>114.554.000.000,00</b> |
| I  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Padang |  | 1 tahun        | 21.276.071.438,00   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Padang                  |  | 1 tahun        | 21.276.071.438,00 |     |                           |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Padang | Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas  | 1 Tahun        | 1.871.705.089,00    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Padang                  | Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas  | 1 Tahun        | 1.871.705.089,00  |     |                           |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Padang | Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet                          | 1 Tahun        | 6.300.000.000,00    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Padang                  | Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet                          | 1 Tahun        | 6.300.000.000,00  |     |                           |
| 3  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah             | Padang | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung                          | 1 Tahun        | 728.850.000,00      | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah             | Padang                  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung                          | 1 Tahun        | 728.850.000,00    |     |                           |
| 4  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                            | Padang | Tercapainya ketersediaan ATK   | 1 Tahun        | 194.799.900,00      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                            | Padang                  | Tercapainya ketersediaan ATK   | 1 Tahun        | 194.799.900,00    |     |                           |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Padang | Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan | 1 Tahun        | 322.610.000,00      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Padang                  | Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan | 1 Tahun        | 322.610.000,00    |     |                           |



|    |  |        |  |         |                  |  |        |  |         |                  |  |
|----|--|--------|--|---------|------------------|--|--------|--|---------|------------------|--|
| 6  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Padang | Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan | 1 Tahun | 95.174.400,00    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Padang | Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan | 1 Tahun | 95.174.400,00    |  |
| 7  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor   | Padang | Tersedianya Kenyamanan dan Kebersihan, Kenyamanan dan Keamanan Kantor                          | 1 Tahun | 3.087.796.099,00 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor   | Padang | Tersedianya Kenyamanan dan Kebersihan, Kenyamanan dan Keamanan Kantor                          | 1 Tahun | 3.087.796.099,00 |  |
| 8  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Padang | Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD          | 1 Tahun | 64.305.000,00    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Padang | Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD          | 1 Tahun | 64.305.000,00    |  |
| 9  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Padang | Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD                               | 1 Tahun | 682.590.000,00   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Padang | Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD                               | 1 Tahun | 682.590.000,00   |  |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah      | Padang | Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi  | 1 Tahun | 6.334.364.800,00 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah      | Padang | Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi  | 1 Tahun | 6.334.364.800,00 |  |
| 11 | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur              | Padang | Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD                                | 1 Tahun | 70.800.000,00    | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur              | Padang | Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD                                | 1 Tahun | 70.800.000,00    |  |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Padang | Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD                 | 1 Tahun | 969.130.000,00   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Padang | Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD                 | 1 Tahun | 969.130.000,00   |  |

**Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

|                |                          |   |               |  |                |                          |  |
|----------------|--------------------------|---|---------------|--|----------------|--------------------------|--|
| 1 Tahun        | 277.796.150,00           | Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD  | Padang        | Tertatanya Administrasi arsip dengan baik  | 1 Tahun        | 277.796.150,00           |  |
| 1 Tahun        | 198.250.000,00           | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Padang        | Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar                                       | 1 Tahun        | 198.250.000,00           |  |
| 1 Tahun        | 80.900.000,00            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Padang        |  | 1 Tahun        | 80.900.000,00            |  |
| <b>1 Tahun</b> | <b>23.686.097.895,00</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     | <b>1 Tahun</b> | <b>23.686.097.895,00</b> |  |
| 1 Tahun        | 639.980.000,00           | Pengadaan Mebeleur  | Padang        | Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD                           | 1 Tahun        | 639.980.000,00           |  |
| 1 Tahun        | 1.437.900.000,00         | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi   | Padang        | Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | 1 Tahun        | 1.437.900.000,00         |  |

|    |   |        |  |         |                   |   |        |  |         |                   |  |
|----|---|--------|--|---------|-------------------|---|--------|--|---------|-------------------|--|
| 3  | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi                       | Padang | Tercapainya ketersediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | 1 Tahun | 190.000.000,00    | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi                       | Padang | Tercapainya ketersediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | 1 Tahun | 190.000.000,00    |  |
| 4  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi | Padang | Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi kantor  | 1 Tahun | 154.200.000,00    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi | Padang | Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi kantor  | 1 Tahun | 154.200.000,00    |  |
| 5  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Padang | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor   | 1 Tahun | 1.651.500.000,00  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Padang | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor   | 1 Tahun | 1.651.500.000,00  |  |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas                          | Padang | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional   | 1 Tahun | 791.483.750,00    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas                          | Padang | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional   | 1 Tahun | 791.483.750,00    |  |
| 7  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor                        | Padang | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor   | 1 Tahun | 612.450.000,00    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor                        | Padang | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor   | 1 Tahun | 612.450.000,00    |  |
| 8  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler   | Padang | Terpeliharanya Meubelair Kantor  | 1 Tahun | 241.750.000,00    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler   | Padang | Terpeliharanya Meubelair Kantor  | 1 Tahun | 241.750.000,00    |  |
| 9  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                  | Padang | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor  | 1 Tahun | 44.750.000,00     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                  | Padang | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor  | 1 Tahun | 44.750.000,00     |  |
| 10 | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                       | Padang | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun | 12.527.607.578,00 | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                       | Padang | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun | 12.527.607.578,00 |  |

|    |  |        |  |         |                |  |        |  |         |                |  |
|----|--|--------|--|---------|----------------|--|--------|--|---------|----------------|--|
| 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan                          | Padang | Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor   | 1 Tahun | 190.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan                          | Padang | Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor   | 1 Tahun | 190.000.000,00 |  |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                   | Padang | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris                  | 1 Tahun | 443.014.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                   | Padang | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris                  | 1 Tahun | 443.014.000,00 |  |
| 13 | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess                  | Padang | Tersedianya perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess                | 1 Tahun | 200.000.000,00 | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess                  | Padang | Tersedianya perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess                | 1 Tahun | 200.000.000,00 |  |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess                        | Padang | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess  | 1 Tahun | 747.297.467,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess                        | Padang | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess  | 1 Tahun | 747.297.467,00 |  |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Padang | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess                         | 1 Tahun | 288.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Padang | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess                         | 1 Tahun | 288.000.000,00 |  |
| 16 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Padang | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar | 1 Tahun | 350.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Padang | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar | 1 Tahun | 350.000.000,00 |  |

|            |  |               |  |                |                         |  |               |  |                |                         |  |
|------------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|
| 17         | Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess       | Padang        | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun        | 2.725.965.100,00        | Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess       | Padang        | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun        | 2.725.965.100,00        |  |
| 18         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  | Padang        | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun        | 450.200.000,00          | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  | Padang        | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | 1 Tahun        | 450.200.000,00          |  |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                 | <b>1 Tahun</b> | <b>1.966.755.029,00</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                 | <b>1 Tahun</b> | <b>1.966.755.029,00</b> |  |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya            | Padang        | Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan anggota DPRD dalam berpakaian dinas | 1 Tahun        | 1.966.755.029,00        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya            | Padang        | Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan anggota DPRD dalam berpakaian dinas | 1 Tahun        | 1.966.755.029,00        |  |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                    | <b>1 Tahun</b> | <b>907.035.404,00</b>   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                    | <b>1 Tahun</b> | <b>907.035.404,00</b>   |  |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Padang        | Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK                                   | 1 Tahun        | 448.935.404,00          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Padang        | Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK                                   | 1 Tahun        | 448.935.404,00          |  |
| 2          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan               | Padang        | Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan           | 1 Tahun        | 458.100.000,00          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan               | Padang        | Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan           | 1 Tahun        | 458.100.000,00          |  |

|           |   |               |   |                |                          |   |               |   |                |                          |  |
|-----------|---|---------------|---|----------------|--------------------------|---|---------------|---|----------------|--------------------------|--|
| <b>V</b>  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>1.763.505.089,00</b>  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>1.763.505.089,00</b>  |  |
| 1         | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Padang        | Tersedianya Renja, RKA, DPA   | 1 Tahun        | 296.345.000,00           | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Padang        | Tersedianya Renja, RKA, DPA   | 1 Tahun        | 296.345.000,00           |  |
| 2         | Penatausahaan Keuangan SKPD   | Padang        | Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD  | 1 Tahun        | 486.528.760,00           | Penatausahaan Keuangan SKPD   | Padang        | Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD  | 1 Tahun        | 486.528.760,00           |  |
| 3         | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Padang        | Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan) | 1 Tahun        | 534.658.000,00           | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Padang        | Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan) | 1 Tahun        | 534.658.000,00           |  |
| 4         | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD                                     | Padang        | Tertatanya administrasi asset dengan baik   | 1 Tahun        | 445.973.329,00           | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD                                     | Padang        | Tertatnya administrasi asset dengan baik  | 1 Tahun        | 445.973.329,00           |  |
| <b>VI</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>1 Tahun</b> | <b>64.954.535.145,00</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>Padang</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>1 Tahun</b> | <b>64.954.535.145,00</b> |  |

|   |   |        |  |         |                   |   |        |  |         |                   |  |
|---|---|--------|--|---------|-------------------|---|--------|--|---------|-------------------|--|
| 1 | Pembahasan Rancangan Perda                                  | Padang | Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah       | 1 Tahun | 24.724.524.100,00 | Pembahasan Rancangan Perda                                  | Padang | Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah       | 1 Tahun | 17.175.463.937,00 |  |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD | Padang | Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang | 1 Tahun | 4.291.767.100,00  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD | Padang | Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang | 1 Tahun | 4.291.767.100,00  |  |
| 3 | Reses   | Padang | Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat    | 1 Tahun | 5.313.180.000,00  | Reses   | Padang | Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat    | 1 Tahun | 5.313.180.000,00  |  |
| 4 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah      | Padang | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 1 Tahun | 6.325.268.287,00  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah      | Padang | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 1 Tahun | 100.000.000,00    |  |
| 5 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah             | Padang | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 1 Tahun | 17.634.526.028,00 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah             | Padang | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 1 Tahun | 17.634.526.028,00 |  |
| 6 | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda                        | Padang | Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah  | 1 Tahun | 2.001.021.420,00  | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda                        | Padang | Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah  | 1 Tahun | 2.001.021.420,00  |  |

|    |   |        |   |         |                  |   |        |   |         |                  |   |
|----|---|--------|---|---------|------------------|---|--------|---|---------|------------------|---|
| 7  | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  | Padang | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum  | 1 Tahun | 83.215.000,00    | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  | Padang | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum  | 1 Tahun | 0                | Anggaan dipindahkan ke kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU |
| 8  | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | Padang | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum  | 1 Tahun | 93.189.800,00    | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | Padang | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum  | 1 Tahun | 176.404.800,00   | Penambahan anggaran dari kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  |
| 9  | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | Padang | Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi                   | 1 Tahun | 166.154.560,00   | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | Padang | Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi                   | 1 Tahun | 166.154.560,00   |   |
| 10 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | Padang | Terpublikasinya kegiatan kedewanan di media cetak dan media elektronik                              | 1 Tahun | 3.338.039.850,00 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | Padang | Terpublikasinya kegiatan kedewanan di media cetak dan media elektronik                              | 1 Tahun | 3.338.039.850,00 |   |
| 11 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  | Padang | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | 1 Tahun | 983.649.000,00   | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  | Padang | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | 1 Tahun | 983.649.000,00   |   |



|    |  |  |  |  |  |   |        |   |             |                  |   |
|----|--|--|--|--|--|---|--------|---|-------------|------------------|---|
| 12 |  |  |  |  |  | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat | Padang | Meningkatnya aspirasi yang disalurkan melalui pemangku kepentingan            | 1 tahun     | 813.715.000      | Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| 13 |  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                     | Padang | Meningkatnya Kepatuhan OPD mitra dalam melaksanakan kegiatan/ pembangunan     | 1 tahun     | 1.365.801.000,00 | Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| 14 |  |  |  |  |  | Pembahasan Penyusunan APBD  | Padang | Disepakatinya rancangan rancangan KUAPPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD Perubahan | 4 Keputusan | 9.070.863.300,00 | Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| 15 |  |  |  |  |  | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   | Padang | Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                     | 1 kali      | 2.523.949.150,00 | Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pengusulan program untuk tahun 2020 sama dengan tahun 2019 tapi berbeda dengan program tahun-tahun sebelum tahun 2018 dimana ada 6 (enam) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2020 dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dirasa tidak akan berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena hanya program yang berubah dalam pengusulan program tahun 2020 namun kegiatan yang disajikan masih relevan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini kami sajikan Tabel T.VI.C.9

**TABEL T.VI.C.9**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No. | Program/Kegiatan   | Lokasi         | Indikator hasil/outcome  | Target      |
|-----|--|----------------|--|-------------|
| I   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 15 (lima belas) kegiatan antara lain:</b> |                | <b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>  | <b>100%</b> |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Sumatera Barat | Terlaksananya penyampaian surat-surat dinas yang tepat guna dan tepat sasaran                                      | 100%        |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Padang         | - Tersedianya koneksi internet , SIPKD, jaringan FO<br>- Lancarnya kegiatan operasional kantor                     | 12 bulan    |
| 3   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan, dan Sopir Kantor                                  | Padang         | Terwujudnya Kenyamanan dan Kebersihan kantor, pengamanan dan sopir kantor  | 1 tahun     |
| 4   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Padang         | Tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD                          | 100%        |
| 5   | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah  | Padang         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung  | 1 tahun     |
| 6   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Padang         | Tercapainya ketersediaan ATK   | 100%        |
| 7   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Padang         | Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan                     | 100%        |
| 8   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | Padang         | Tercapainya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan pada bangunan/ruangan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | 100%        |
| 9   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Padang         | Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor Sekretariat DPRD                              | 100%        |
| 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Padang         | Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD   | 100%        |

|           |  |        |   |             |
|-----------|--|--------|---|-------------|
| 11        | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah  | Padang | Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah                    | 100%        |
| 12        | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur  | Padang | Terlaksananya kelancaran pembinaan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD                       | 1 Tahun     |
| 13        | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Padang | Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD                    | 1 Tahun     |
| 14        | Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD   | Padang | Tertatanya administrasi arsip dengan baik   | 100%        |
| 15        | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD                    | Padang | Terwujudnya Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar  | 100%        |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 18 (delapan belas) kegiatan antara lain:</b> | Padang | <b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur</b>  | <b>100%</b> |
| 1         | Pengadaan Mebeleur   | Padang | Tersedianya Kebutuhan mebeleur pada kantor Sekretariat DPRD                                       | 100%        |
| 2         | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi  | Padang | Terpenuhinya kebutuhan komputer dan jaringan komputerisasi pada kantor Sekretariat DPRD           | 100%        |
| 3         | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi  | Padang | Tercapainya Kebutuhan alat studio, komunikasi dan informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | 100%        |
| 4         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi                            | Padang | Terpeliharanya alat studio, komunikasi dan alat informasi dalam keadaan siap pakai                | 1 Tahun     |
| 5         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | Padang | Terpeliharanya gedung kantor  | 1 Tahun     |
| 6         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas   | Padang | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional  | 1 Tahun     |
| 7         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor   | Padang | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor  | 1 Tahun     |
| 8         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler  | Padang | Terpeliharanya meubeler kantor  | 1 Tahun     |
| 9         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi   | Padang | Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi kantor   | 1 Tahun     |
| 10        | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor  | Padang | Terpeliharanya gedung kantor  | 100%        |
| 11        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan  | Padang | Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor  | 1 Tahun     |

|            |  |               |  |             |
|------------|--|---------------|--|-------------|
| 12         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan   | Padang        | Terpeliharanya kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan sekretaris  | 1 Tahun     |
| 13         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  | Padang        | Terpenuhinya kebutuhan pokok, perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess            | 12 bulan    |
| 14         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess  | Padang        | Terpeliharanya rumah jabatan/dinas/mess, terlaksananya kenyamanan rumah jabatan/dinas/mess               | 12 bulan    |
| 15         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess   | Padang        | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess                                       | 1 tahun     |
| 16         | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional  | Padang        | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bermotor pada kantor  | 100%        |
| 17         | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/jabatan/mess   | Padang        | Terpeliharanya rumah dinas/jabatan/mess  | 1 Tahun     |
| 18         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor  | Padang        | Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD                  | 100%        |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan antara lain:</b>   | <b>Padang</b> | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  | <b>100%</b> |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  | Padang        | Terpenuhinya standar kerapian dan disiplin pegawai dan Anggota DPRD dalam berpakaian dinas               | 100%        |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:</b>                               | <b>Padang</b> | <b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>100%</b> |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan   | Padang        | Meningkatnya kapasitas, wawasan, dan kemampuan sumber daya Aparatur tentang Peraturan Perundang-undangan | 100%        |
| 2          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan   | Padang        | Meningkatnya pengetahuan Aparatur tentang peraturan perundang-undangan                                   | 100%        |
| <b>V</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 4 (empat) kegiatan antara lain:</b> | <b>Padang</b> |  |             |
| 1          | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Padang        | Tertatanya Dokumen Perencanaan dan Keuangan  | 100%        |

|           |   |               |  |             |
|-----------|---|---------------|--|-------------|
| 2         | Penatausahaan Keuangan SKPD   | Padang        | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan OPD   | 100%        |
| 3         | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Padang        | Tersusunnya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)          | 1 Tahun     |
| 4         | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD   | Padang        | Tertatanya administrasi Aset dengan baik   | 100%        |
| <b>VI</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdapat 14 (empat belas) kegiatan antara lain:</b>         | <b>Padang</b> | <b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                                       | <b>100%</b> |
| 1         | Pembahasan Rancangan Perda  | Padang        | Tersedianya payung hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah           | 100%        |
| 2         | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   | Padang        | Meningkatkan kualitas pemahaman pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang | 100%        |
| 3         | Reses   | Padang        | Terjangungnya aspirasi masyarakat kabupaten/Kota untuk perencanaan Pembangunan di prov. Sumbar       | 1 Tahun     |
| 4         | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | Padang        | terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 100%        |
| 5         | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah   | Padang        | terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | 100%        |
| 6         | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda  | Padang        | Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah                                   | 100%        |
| 7         | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | Padang        | Meningkatnya Kualitas produk hukum yang dihasilkan   | 100%        |
| 8         | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | Padang        | Tercapainya kesepakatan mengenai Pembahasan Ranperda   | 100%]       |
| 9         | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | Padang        | Terpublikasinya kegiatan Dewan di Media Cetak dan Elektronik   | 1 tahun     |
| 10        | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  | Padang        | Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami produk hukum pemerintah daerah prov. Sumbar             | 100%        |
| 11        | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat   | Padang        | Meningkatnya aspirasi yang disalurkan melalui pemangku kepentingan                                   | 1 tahun     |

|    |   |        |   |             |
|----|---|--------|---|-------------|
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | Padang | Meningkatnya kepatuhan mitra DPRD dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan | 1 tahun     |
| 13 | Pembahasan Penyusunan APBD                      | Padang | Disepakatinya rancangan KUAPPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD Perubahan           | 4 Keputusan |
| 14 | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah     | Padang | Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                     | 1 kali      |

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang secara Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada DPRD yaitu membantu kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat pada Prioritas II Yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan yaitu dengan meningkatkan Disiplin Aparatur, mencegah terjadinya perbuatan KKN, meningkatkan kemampuan SDM dibidang tugasnya. dan mendukung pelaksanaan Program Nasional yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMN yang diakomodir dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan beberapa kegiatan yang mempunyai sasaran, tujuan dan kebijakan sudah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan ditambah dengan beberapa program lainnya sebagai pendukung program pokok dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Maka sesuai dengan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI yang dilaksanakan oleh seluruh OPD.

**Tujuan** mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

**“Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”**

**“Meningkatkan Tata Kelola Organisasi”**

**Sasaran** yang ingin akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang telah ditetapkan antara lain;



1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Pemangku Kepentingan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Melakukan evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Melaksanakan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan agar kualitas sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima.
5. Melaksanakan bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh Visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tahun 2020, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan dan merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

| <b>I</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |
|----------|--|
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  |
| 3        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor           |
| 4        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |
| 5        | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                              |
| 6        | Penyediaan Alat Tulis Kantor   |
| 7        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  |
| 8        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |
| 9        | Penyediaan peralatan rumah tangga  |
| 10       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 |
| 11       | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah |
| 12       | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                      |
| 13       | Penyediaan Makanan dan Minuman   |

|            |   |
|------------|---|
| 14         | Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD  |
| 15         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| <b>II</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |
| 1          | Pengadaan mebeleur  |
| 2          | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi   |
| 3          | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi  |
| 4          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi                           |
| 5          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  |
| 6          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  |
| 7          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |
| 8          | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur  |
| 9          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                                  |
| 10         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan   |
| 11         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  |
| 12         | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   |
| 13         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess   |
| 14         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess   |
| 15         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess                        |
| 16         | Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess  |
| 17         | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |
| 18         | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor   |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  |
| 2          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan  |
| <b>V</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>             |
| 1          | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  |
| 2          | Penatausahaan Keuangan SKPD   |
| 3          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            |
| 4          | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD   |
| <b>VI</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                             |
| 1          | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   |
| 2          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah  |
| 3          | Pembahasan Rancangan Perda  |
| 4          | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah  |
| 5          | Reses   |

|    |   |
|----|---|
| 6  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  |
| 7  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   |
| 8  | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  |
| 9  | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  |
| 10 | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, keserasian peranan per UU |
| 11 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat   |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan   |
| 13 | Pembahasan Penyusunan APBD  |
| 14 | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan jumlah plafon dana sebesar Rp. 114.557.000.000,- (seratus empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No                      | Uraian  | Pagu                   |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>BELANJA LANGSUNG</b> |   | <b>114.554.000.000</b> |
| <b>I</b>                | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>21.276.071.438</b>  |
| 1                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.871.705.089          |
| 2                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 6.300.000.000          |
| 3                       | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor                                    | 3.087.796.099          |
| 4                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 80.900.000             |
| 5                       | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah   | 728.850.000            |
| 6                       | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 194.799.900            |
| 7                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 322.610.000            |
| 8                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  | 95.174.400             |
| 9                       | Penyediaan peralatan rumah tangga   | 64.305.000             |
| 10                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 682.590.000            |
| 11                      | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah                          | 6.334.364.800          |
| 12                      | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur   | 70.800.000             |
| 13                      | Penyediaan Makanan dan Minuman  | 969.130.000            |
| 14                      | Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD  | 277.796.150            |
| 15                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 198.250.000            |
| <b>II</b>               | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>23.686.097.895</b>  |
| 1                       | Pengadaan mebeleur  | 639.980.000            |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 2          | Pengadaan Komputer dan Jaringan<br>Komputerisasi  | 1.437.900.000        |
| 3          | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan<br>Informasi                                   | 190.000.000          |
| 4          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio,<br>Komunikasi dan Informasi                | 154.200.000          |
| 5          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 1.651.500.000        |
| 6          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan<br>Dinas/Operasional                                 | 791.483.750          |
| 7          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                         | 612.450.000          |
| 8          | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur  | 241.750.000          |
| 9          | Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan<br>Jaringan Komputerisasi                       | 44.750.000           |
| 10         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan<br>Jaringan                                      | 190.000.000          |
| 11         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  | 443.014.000          |
| 12         | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | 350.000.000          |
| 13         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah<br>Jabatan/Dinas/Mess                              | 450.200.000          |
| 14         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah<br>Jabatan/Rumah Dinas/Mess                              | 747.297.467          |
| 15         | Pemeliharaan Rutin/Berkala<br>Peralatan/Perlengkapan Rumah<br>Jabatan/Dinas/Mess          | 288.000.000          |
| 16         | Rehabilitasi sedang / berat rumah<br>dinas/jabatan/mess                                   | 2.725.965.100        |
| 17         | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 200.000.000          |
| 18         | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor   | 12.527.607.578       |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>1.966.755.029</b> |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta<br>Kelengkapannya   | 1.966.755.029        |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber<br/>Daya Aparatur</b>                             | <b>907.035.404</b>   |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-undangan                             | 448.935.404          |
| 2          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan  | 458.100.000          |
| <b>V</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem<br/>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>1.763.505.089</b> |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | 296.345.000           |
| 2         | Penatausahaan Keuangan SKPD   | 486.528.760           |
| 3         | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 534.658.000           |
| 4         | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD   | 445.973.329           |
| <b>VI</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>   | <b>64.954.535.145</b> |
| 1         | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | 3.338.039.850         |
| 2         | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah  | 17.634.526.028        |
| 3         | Pembahasan Rancangan Perda  | 17.175.463.937        |
| 4         | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah  | 2.001.021.420         |
| 5         | Reses   | 5.313.180.000         |
| 6         | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | 100.000.000           |
| 7         | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   | 4.291.767.100         |
| 8         | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | 166.154.560           |
| 9         | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, keserasian peranan per UU | 176.404.800           |
| 10        | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | 983.649.000           |
| 11        | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat   | 813.715.000           |
| 12        | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan   | 1.365.801.000         |
| 13        | Pembahasan Penyusunan APBD  | 9.070.863.300         |
| 14        | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   | 2.523.949.150         |

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T.C.33 berikut:

**Tabel T.C.33**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No       | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                |                          |             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 |                          |
|----------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
|          |  |  | Lokasi             | Target Capaian | Kebutuhan Dana           | Sumber Dana | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana           |
| <b>1</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>  | <b>Padang</b>      | <b>1 tahun</b> | <b>21.276.071.438,00</b> | <b>APBD</b> | <b>1 tahun</b>                    | <b>29.412.805.094,00</b> |
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas  | Padang             | 1 Tahun        | 1.871.705.089,00         | APBD        | 1 Tahun                           | 2.650.819.355,00         |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet                          | Padang             | 1 Tahun        | 6.300.000.000,00         | APBD        | 1 Tahun                           | 8.520.000.000,00         |
| 3        | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                      | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung                          | Padang             | 1 Tahun        | 725.850.000,00           | APBD        | 1 Tahun                           | 1.208.850.000,00         |
| 4        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tercapainya ketersediaan ATK   | Padang             | 1 Tahun        | 194.799.900,00           | APBD        | 1 Tahun                           | 240.578.100,00           |
| 5        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan | Padang             | 1 Tahun        | 322.610.000,00           | APBD        | 1 Tahun                           | 322.610.000,00           |
| 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan | Padang             | 1 Tahun        | 95.174.400,00            | APBD        | 1 Tahun                           | 84.706.400,00            |
| 7        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD      | Padang             | 1 Tahun        | 80.900.000,00            | APBD        | 1 Tahun                           | 295.800.000,00           |
| 8        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD          | Padang             | 1 Tahun        | 64.305.000,00            | APBD        | 1 Tahun                           | 64.305.000,00            |

|           |   |  |               |                |                          |             |                |                         |
|-----------|---|--|---------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 9         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                | Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD   | Padang        | 1 Tahun        | 682.590.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 682.590.000,00          |
| 10        | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah                             | Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi  | Padang        | 1 Tahun        | 6.334.364.800,00         | APBD        | 1 Tahun        | 8.790.435.200,00        |
| 11        | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur                                     | Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD  | Padang        | 1 Tahun        | 70.800.000,00            | APBD        | 1 Tahun        | 70.800.000,00           |
| 12        | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD                                 | Padang        | 1 Tahun        | 969.130.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 2.035.100.000,00        |
| 13        | Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD  | Tertatanya Administrasi arsip dengan baik  | Padang        | 1 Tahun        | 277.796.150,00           | APBD        | 1 Tahun        | 317.934.200,00          |
| 14        | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar   | Padang        | 65 orang       | 198.250.000,00           | APBD        | 65 orang       | 263.250.000,00          |
| 15        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor                          | Tersedianya kenyamanan, kebersihan dan keamanan kantor   | Padang        | 1 Tahun        | 3.087.796.099,00         | APBD        | 1 Tahun        | 3.865.026.839,00        |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                | <b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>Padang</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>23.686.097.895,00</b> | <b>APBD</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>8.577.210.660,00</b> |
| 1         | Pengadaan Mebeleur  | Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD                                       | Padang        | 1 Tahun        | 639.980.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 224.000.000,00          |
| 2         | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi   | Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD             | Padang        | 1 Tahun        | 1.437.900.000,00         | APBD        | 1 Tahun        | 160.000.000,00          |
| 3         | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi                               | Tercapainya ketersediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD | Padang        | 1 Tahun        | 190.000.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 190.000.000,00          |
| 4         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi         | Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi kantor  | Padang        | 1 Tahun        | 154.200.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 154.200.000,00          |



|    |  |  |        |         |                   |      |         |                  |
|----|--|--|--------|---------|-------------------|------|---------|------------------|
| 5  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor   | Padang | 1 Tahun | 1.651.500.000,00  | APBD | 1 Tahun | 1.421.500.000,00 |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas                     | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional                                     | Padang | 1 Tahun | 791.483.750,00    | APBD | 1 Tahun | 825.872.750,00   |
| 7  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor   | Padang | 1 Tahun | 612.450.000,00    | APBD | 1 Tahun | 612.450.000,00   |
| 8  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler  | Terpeliharanya Meubelair Kantor  | Padang | 1 Tahun | 241.750.000,00    | APBD | 1 Tahun | 241.750.000,00   |
| 9  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi             | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor                      | Padang | 1 Tahun | 44.750.000,00     | APBD | 1 Tahun | 44.750.000,00    |
| 10 | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                  | Terwujudnya pelayanan yang terbaik   | Padang | 1 Tahun | 12.527.607.578,00 | APBD | 1 Tahun | 359.861.343,00   |
| 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan                          | Terpeliharanya installasi dan jaringan kantor  | Padang | 1 Tahun | 190.000.000,00    | APBD | 1 Tahun | 200.000.000,00   |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                   | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris                  | Padang | 1 Tahun | 443.014.000,00    | APBD | 1 Tahun | 443.014.000,00   |
| 13 | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess                  | Tersedianya perlengkapan pakai habis dan perlatan rumah jabatan/dinas/mess                 | Padang | 1 Tahun | 450.200.000,00    | APBD | 1 Tahun | 450.200.000,00   |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess                        | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess  | Padang | 1 Tahun | 747.297.467,00    | APBD | 1 Tahun | 747.297.467,00   |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess                         | Padang | 1 Tahun | 288.000.000,00    | APBD | 1 Tahun | 288.000.000,00   |
| 16 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                                    | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar | Padang | 1 Tahun | 350.000.000,00    | APBD | 1 Tahun | 500.000.000,00   |
| 17 | Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas / jabatan / mess                   | Meningkatnya pelayanan yang terbaik  | Padang | 1 Tahun | 2.725.965.100,00  | APBD | 1 Tahun | 1.694.315.100,00 |

|            |   |   |               |                |                          |             |                |                          |
|------------|---|---|---------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 18         | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor   | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar  | Padang        | 1 Tahun        | 200.000.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 20.000.000,00            |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Padang</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>1.966.755.029,00</b>  | <b>APBD</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>1.968.951.000,00</b>  |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan anggota DPRD dalam berpakaian dinas          | Padang        | 1 Tahun        | 1.966.755.029,00         | APBD        | 1 Tahun        | 1.968.951.000,00         |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Padang</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>907.035.404,00</b>    | <b>APBD</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>955.365.600,00</b>    |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                            | Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK  | Padang        | 1 Tahun        | 448.935.404,00           | APBD        | 1 Tahun        | 491.440.320,00           |
| 2          | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan                    | Padang        | 1 Tahun        | 458.100.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 463.925.280,00           |
| <b>V</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Padang</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>1.763.505.089,00</b>  | <b>APBD</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>2.296.480.592,00</b>  |
| 1          | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Tersedianya Renja, RKA, DPA   | Padang        | 1 Tahun        | 296.345.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 371.433.381,00           |
| 2          | Penatausahaan Keuangan SKPD   | Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD  | Padang        | 1 Tahun        | 486.528.760,00           | APBD        | 1 Tahun        | 630.025.320,00           |
| 3          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan) | Padang        | 1 Tahun        | 534.658.000,00           | APBD        | 1 Tahun        | 606.439.000,00           |
| 4          | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD                                     | Tertatanya administrasi asset dengan baik   | Padang        | 1 Tahun        | 445.973.329,00           | APBD        | 1 Tahun        | 688.582.891,00           |
| <b>VI</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                 | <b>Padang</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>64.954.535.145,00</b> | <b>APBD</b> | <b>1 Tahun</b> | <b>99.239.187.054,00</b> |

|    |   |  |        |         |                   |      |         |                   |
|----|---|--|--------|---------|-------------------|------|---------|-------------------|
| 1  | Pembahasan Rancangan Perda  | Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah       | Padang | 1 Tahun | 17.175.463.937,00 | APBD | 1 Tahun | 30.450.822.854,00 |
| 2  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   | Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang | Padang | 1 Tahun | 4.291.767.100,00  | APBD | 1 Tahun | 11.985.848.280,00 |
| 3  | Reses   | Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat    | Padang | 1 Tahun | 5.313.180.000,00  | APBD | 1 Tahun | 3.904.570.863,00  |
| 4  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | Padang | 1 Tahun | 100.000.000,00    | APBD | 1 Tahun | 1.367.147.980,00  |
| 5  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah   | Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD   | Padang | 1 Tahun | 17.634.526.028,00 | APBD | 1 Tahun | 20.306.340.297,00 |
| 6  | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda  | Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah  | Padang | 1 Tahun | 2.001.021.420,00  | APBD | 1 Tahun | 7.499.957.400,00  |
| 7  | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum   | Padang | 1 Tahun | 176.404.800,00    | APBD | 1 Tahun | 189.950.220,00    |
| 8  | Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  | Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi                        | Padang | 1 Tahun | 166.154.560,00    | APBD | 1 Tahun | 189.388.200,00    |
| 9  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | Terpublikasinya kegiatan kedewanan di media cetak dan media elektronik                                   | Padang | 1 Tahun | 3.338.039.850,00  | APBD | 1 Tahun | 5.680.806.960,00  |
| 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat      | Padang | 1 Tahun | 983.649.000,00    | APBD | 1 Tahun | 1.135.039.860,00  |
| 11 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat   | Meningkatnya aspirasi yang disalurkan melalui pemangku kepentingan                                       | Padang | 1 tahun | 813.715.000,00    | APBD | 1 Tahun | 976.458.000,00    |

|    |   |   |        |             |                           |      |         |                           |
|----|---|---|--------|-------------|---------------------------|------|---------|---------------------------|
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | Meningkatnya kepatuhan mitra DPRD dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan | Padang | 1 tahun     | 1.365.801.000,00          | APBD | 1 Tahun | 1.638.961.200,00          |
| 13 | Pembahasan Penyusunan APBD                      | Disepakatinya rancangan KUAPPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD Perubahan           | Padang | 4 keputusan | 9.070.963.300,00          | APBD | 1 Tahun | 10.885.155.960,00         |
| 14 | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah     | Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                     | Padang | 1 kali      | 2.523.949.150,00          | APBD | 1 Tahun | 3.028.738.980,00          |
|    |   |   |        |             | <b>114.554.000.000,00</b> |      |         | <b>142.450.000.000,00</b> |

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan (Bagian) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat maka kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 karena program dan kegiatan yang diajukan ini adalah menyangkut kepentingan bersama dalam mendukung visi dan misi kepada daerah dan menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian harapan kita agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bersama terutama bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Juni 2019

Sekretaris DPRD  
Provinsi Sumatera Barat



**H. Rafi, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640930 198602 1 002